

Strategi Komunikasi dalam Rangka Menyelesaikan Permasalahan Masyarakat Sekitar Hutan di Kabupaten Lima Puluh Kota

Ria Wijayanty¹, Susi Evanita²

^{1,2} Program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan, Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

e-mail: wijayantyvonny@gmail.com¹, susievanita@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa strategi komunikasi penyelesaian konflik perusakan hutan, mengetahui peran Pemerintah dalam menjaga pelestarian hutan dan pendapatan ekonomi masyarakat terhadap hutan di Lima Puluh Kota. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan bidang kehutanan secara umum yang diatur dengan Keputusan Menteri Kehutanan dapat dikemukakan, di antaranya: (1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 6884/KPTS-II/2002 tanggal 12 Juli 2012 tentang Kriteria dan Tata Cara Evaluasi terhadap Industri Priemer Hasil Hutan Kayu; (2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 6885/KPTS-II/2002 tanggal 12 Juli 2012 tentang Tata Cara Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan; (3) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 178/KPTS-II/2003 tanggal 12 Juli 2003 tentang Cara Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Unit Manajemen dalam Rangka Pengelolaan Hutan Secara Lestari. Tindakan untuk mengantisipasi masalah ini dengan menggunakan strategi komunikasi persuasif, komunikasi lingkungan dan komunikasi pariwisata. Berdasarkan hal ini Pemerintah dapat mengawasi agar tidak terjadi perusakan hutan dan mampu untuk mengelola hutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar hutan di Kabupate Lima Puluh Kota.

Kata kunci: *Strategi Komunikasi, Perusakan Hutan, Ekonomi Masyarakat*

Abstract

This study aims to analyze communication strategies for conflict resolution of forest destruction, to find out the role of the Government in maintaining forest conservation and community income towards forests in Fifty Cities. This research shows that the regulation in the forestry sector in general regulated by the Decree of the Minister of Forestry can be put forward, among others: (1) Decree of the Minister of Forestry Number: 6884/KPTS-II/2002 dated July 12, 2012 concerning Criteria and Procedures for Evaluation of Primary Industries Timber Forest; (2) Ministerial Decree Number: 6885/KPTS-II/2002 dated July 12, 2012 concerning Procedures for Requirements for Extension of Business Permits for Utilization of Forest Products; (3) Decree of the Minister of Forestry Number 178/KPTS-II/2003 dated July 12, 2003 concerning Methods of Assessment of Business Performance in the Utilization of Plantation Forest Management Units in the Context of Sustainable Forest Management. Actions to anticipate this problem by using persuasive communication strategies, environmental communication and tourism communication. Based on this, the Government can supervise so that forest destruction does not occur and be able to manage forests to improve the economy of the community around the forest in Fifty Cities Regency.

Keywords : *Communication Strategy, Forest Destruction, Community Economy*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa hutan merupakan suatu ekosistem, artinya konsep pengelolaannya harus menyeluruh yang

memadukan unsur biotik dan abiotik beserta unsur lingkungan lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan secara lestari (*sustainable*).

Pengaturan Kawasan Hutan di Indonesia diatur dalam berbagai kebijakan misalnya Undang-undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999, Undang-undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan atau dikenal dengan UUP3H dan beberapa Undang-undang lainnya, seperti Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup beserta aturan turunan yang menyertainya sebagai penjabaran yang lebih detail.

Pembangunan ekonomi yang berjalan saat ini biasanya disebut dengan pembangunan konvensional, yang diakui telah dapat mensejahterakan masyarakat. Hal ini juga merupakan pola pembangunan nasional Indonesia yang dilaksanakan sebelum tahun 1990-an, yang juga membuktikan adanya peningkatan kesejahteraan penduduk Indonesia. Karakteristik pembangunan konvensional umumnya dititik beratkan pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan hasil pembangunan dan terjaminnya stabilitas nasional.

Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada 0°25'28,71"LU-0°22'14,52"LS dan 100°15'44,10"BT-100°50'47,80"BT dengan luas ± 3.354,30 (tiga ribu tiga ratus lima puluh empat koma tiga) km², terdiri atas 13 kecamatan dan 79 nagari dan Jumlah Penduduk : 368.985 jiwa dengan batas-batas administrasi sebagai berikut: Sebelah utara: Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar (Provinsi Riau), Sebelah timur: Kabupaten Kampar (Provinsi Riau), sebelah selatan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung, sebelah barat: Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman dan Bagian tengah berbatasan dengan Kota Payakumbuh.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah maraknya terjadi pembalakan liar, kebakaran hutan terjadi diakibatkan ulah manusia yang tidak bertanggung jawab dan pada saat musim hujan datang, akan terjadi banjir dimana-mana, karena pepohonan sudah banyak yang ditebang habis. Belum lagi pada saat masyarakat di sekitar hutan mengambil hasil hutan tanpa mengurus izinnya terlebih dahulu. Hal ini bisa mengakibatkan masyarakat tersebut berurusan dengan aparat hukum. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak punya pilihan lain karena himpitan ekonomi. Jika dibiarkan hal ini terus menerus maka akan terjadi kerusakan lingkungan yang semakin parah dan jika terjadi bencana maka kondisi sosial dan ekonomi masyarakat akan semakin terpuruk.

Berikut gambar fenomena yang terjadi akibat tidak baiknya strategi komunikasi yang dilakukan sehingga mengakibatkan kebakaran hutan, efek terbakarnya hutan mengakibatkan banjir



Gambar 1 Kebakaran Hutan dan Banjir

Permasalahan sosial, ekonomi, dan kebijakan tentunya juga akan mempengaruhi pengelolaan hutan secara berkelanjutan khususnya dalam pengembangan ekowisata. Dalam pengelolaan perhutanan sosial bukan saja masyarakat yang terlibat, namun berbagai bentuk partisipasi juga ikut campur dalam pengelolaan hutan seperti pemerintah, LSM, koperasi, perbankan, perguruan tinggi dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra dalam pembangunan kehutanan.

Pada tahun 2021, dinyatakan Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi daerah pilot project untuk kegiatan Penguatan Perhutanan Sosial (strengthening social forestry/SSF) untuk 5(lima) tahun kedepan. Ini merupakan satu dari 5 Kabupaten yang ada di Indonesia dan satu-satunya kabupaten di Sumatera Barat. Maka dengan momen ini harus ada komunikasi yang efektif dengan semua stake holder agar kegiatan penguatan perhutanan sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat berjalan dengan maksimal dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah hutan dan daerah sekitar hutan.

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki beragam potensi baik potensi alam maupun potensi budaya, namun beragamnya potensi tersebut tidak banyak yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dari Perhutanan Sosial tersebut ada 2, yaitu Pemanfaatan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) Contohnya adalah budi daya lebah madu, budi daya jamur, Jengkol, Rotan, banbu, dan lain-lain.

Pengembangan Eko Wisata. Pengembangan ekowisata bisa menjadi pilihan tambahan dengan dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah dalam pengembangan ekowisata daerahnya. Selain itu, dengan adanya area ekowisata akan memungkinkan adanya perlindungan-perlindungan (pelestarian) alam karena salah satu yang ditawarkan dari adanya ekowisata adalah keasrian sebuah kawasan. Oleh karena itu, dengan perkembangan wisata ini akan diperoleh keuntungan dari segi ekonomi dan lingkungan dengan adanya sumber pendapatan baru yang bisa memberikan kontribusi dan mengubah perekonomian masyarakat serta keuntungan lainnya dari segi lingkungan, dimana dengan adanya area ekowisata akan menjadikan masyarakat selalu menjaga lingkungan dari kerusakan-kerusakan yang bisa terjadi, karena mengedepankan aspek keasrian lingkungan sebagai sebuah aksi nyata melalui ekowisata yang ditawarkan.

Strategi Komunikasi merupakan proses pengalokasian sumber daya komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya tersebut tidak saja mencakup media massa dan komunikasi antarpribadi, tapi juga setiap aktivitas yang dirancang untuk mengubah perilaku dan menciptakan keterampilan-keterampilan tertentu diantara individu dan kelompok dalam lingkup tugas-tugas yang dibebankan oleh organisasi (Kenmada, 2013)

Dari beberapa pendapat ahli di atas peneliti menarik kesimpulan bahwasanya Strategi komunikasi merupakan manajemen perencanaan menyeluruh dalam sebuah proses komunikasi untuk mencapai efek yang diinginkan. Efek komunikasi dalam pembangunan didefinisikan sebagai situasi komunikasi yang memungkinkan munculnya partisipasi masyarakat secara sadar, kritis, sukarela, murni, dan bertanggung jawab. Dalam menyusun suatu strategi komunikasi perlu mengembalikan kembali pada elemen-elemen komunikasi oleh Harold Laswell, yaitu *who says what, to whom, through what channels, and what effect* (Hafied, 2013). Berdasarkan permasalahan yang terjadi maka judul penelitian ini adalah Strategi Komunikasi Dalam Rangka Menyelesaikan Permasalahan Masyarakat Sekitar Hutan Di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kajian teori yang digunakan dalam Strategi Komunikasi Dalam Rangka Menyelesaikan Permasalahan Masyarakat Sekitar Hutan Di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan menggunakan dua bagian teori yakni teori birokrasi dan divisi inovasi.

Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris *communication* berasal dari kata latin *communication*, yang bersumber dari kata *communis* yang berarti sama. Sama disini maksudnya adalah sama makna. Jadi, kalau ada dua orang yang terlibat dalam komunikasi, misalnya dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan terjadi dan berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang diperbincangkan (Effendy, 2007 : 9)

Walaupun di dalam percakapan tersebut menggunakan bahasa yang sama, misal berbahasa Indonesia, namun tidak serta merta memiliki kesamaan dalam makna. Mengerti bahasanya saja, belum tentu juga mengerti maksud atau makna yang tersampaikan. Suatu percakapan dikatakan komunikatif, apabila antara komunikan dengan komunikator mengerti bahasa yang digunakan dan memiliki kesamaan dalam memaknai apa yang dipercakapkan.

Sebuah definisi singkat dibuat oleh Harold D. Laswell bahwa cara yang tepat untuk menerangkan suatu tindakan komunikasi ialah menjawab pertanyaan “ siapa yang menyampaikan apa, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa dan apa pengaruhnya (Cangara, 2006 : 18).

Effendy (2004:28) mengatakan bahwa strategi komunikasi baik secara makro (planned media strategy) maupun secara mikro (single communication medium strategy) mempunyai fungsi ganda: Menyebarkan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal. Menjembatani “kesenjangan budaya” atau cultural gap akibat kemudahan diperolehnya dan kemudahan dioperasionalkannya media massa yang begitu ampuh, yang jika dibiarkan akan merusak nilai-nilai budaya.

Komunikasi lingkungan adalah rencana dan strategi melalui proses komunikasi dan produk media untuk mendukung efektivitas pembuatan kebijakan, partisipasi publik, dan implementasinya pada lingkungan (Oepen 1999:6). Dalam pengertian oepen dapat dipahami bahwa komunikasi lingkungan menjadi komponen yang terintegritas dalam kebijakan.

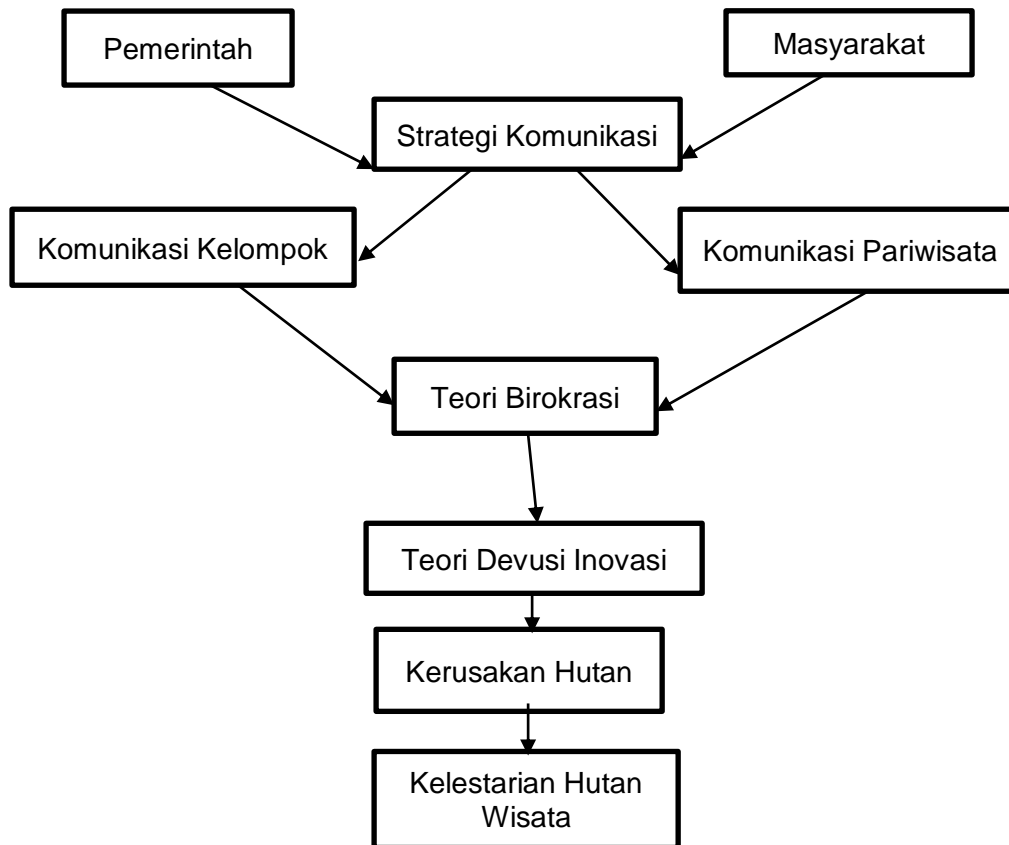
Cox dalam tulisannya “*Environmental Communication and Public Sphere*” (2010:20), menyatakan bahwa komunikasi lingkungan adalah sarana konstitutif dan pragmatis bagi pemahaman manusia dengan lingkungan serta hubungan manusia dengan alam. Hal ini adalah media simbolis yang digunakan dalam mengkonstruksi masalah-masalah lingkungan dan menegosiasikan respon yang berbeda dalam masyarakat.

Menurut Hadiwijoyo (2012:41) pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yaitu pari yang berarti banyak, penuh atau berputar-putar, dan wisata yaitu perjalanan. Jadi, menurut Idris Abduracman dalam Hadiwijoyo (2012:41) Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata, sedangkan orang yang melakukan wisata disebut dengan wisatawan. Komunikasi pariwisata berkembang dengan menyatunya beberapa disiplin ilmu di dalam satu kajian tentang komunikasi dan pariwisata. Kajian komunikasi pariwisata memiliki kedekatan biologis dengan kajian-kajian komunikasi dan pariwisata yang melahirkannya.

Dalam (Effendy, 1992 : 8-9) Komunikasi kelompok (group communication) termasuk komunikasi tatap muka karena komunikator dan komunikan berada dalam situasi saling berhadapan dan saling melihat. Sama dengan komunikasi antar persona, komunikasi kelompok pun menimbulkan arus balik langsung. Komunikator mengetahui tanggapan komunikan pada saat sedang berkomunikasi sehingga, apabila disadari bahwa komunikasinya kurang atau tidak berhasil, ia dapat segera mengubah gayanya.

Kebijakan publik merupakan kebijakan yang menyangkut masyarakat umum. Kebijakan ini merupakan bagian dari keputusan politik. Keputusan politik merupakan keputusan yang mengingat pilihan terbaik dari berbagai bentuk alternatif mengenai urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah. (Ekowati, Mas Roro Lilik. 2009: 1).

Kebijakan komunikasi ialah prinsip-prinsip, aturan atau pedoman yang dibangun dalam sistem komunikasi sehingga kerangka kerja yang digunakan dapat mengordinasikan kegiatan, memilih pendekatan dengan melihat dari kemungkinan dana dan keputusan-keputusan yang struktural dan berpengaruh kepada aktivitas komunikasi, serta berusaha menyisihkan ketidakseimbangan faktor-faktor eksternal dan internal, serta menetapkan prioritas yang dipilih (Cangara, 2013:12).



Gambar 2 Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Tujuan komunikasi pada penelitian ini adalah agar tidak terjadi kebakaran hutan dan tidak ada penebangan hutan liar sehingga mengakibatkan banjir. Pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Pesan dari komunikasi ini adalah agar Pemerintah dapat membuat kebijakan tentang sanksi kepada masyarakat yang melakukan pembakaran hutan dan penebangan hutan liar sehingga tercipta kelestarian hutan menjadi hutan wisata. Sasaran komunikasi yang dilakukan adalah kepada masyarakat dan pemerintah serta Dinas Kehutanan yang ada di Kabupaten 50 Kota. Waktu pada penelitian ini dimulai dari tanggal 25 April sampai dengan 5 Juni 2022, sedangkan lokasi penelitian di Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.

Komunikator dalam penelitian ini adalah mahasiswa program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan dalam mata kuliah Komunikasi Kebijakan Pembangunan dan Lingkungan Universitas Negeri Padang. Stake holders pada penelitian ini adalah Kepala Bidang Dinas Kehutanan Provinsi, Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota, Kepala KPHL.Masyarakat Kapalo Banda Nagarai Taram. Teknik penyampaian pesan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik edukatif, merupakan salah satu usaha mempengaruhi khalayak dari suatu pernyataan umum yang dilontarkan, dapat diwujudkan dalam bentuk pesan yang akan berisi pendapat-pendapat, fakta-fakta, dan pengalaman-pengalaman.

Dalam melakukan penelitian serta menemukan solusi pada penelitian ini menggunakan media komunikasi secara lisan kepada Kepala Bidang Dinas Kehutanan Provinsi, Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota, Kepala KPHL.Masyarakat kapalo banda Nagarai Taram. Pengukuran target capaian yang digunakan pada penelitian ini adalah Prespektif proses internal, Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan Perspektif

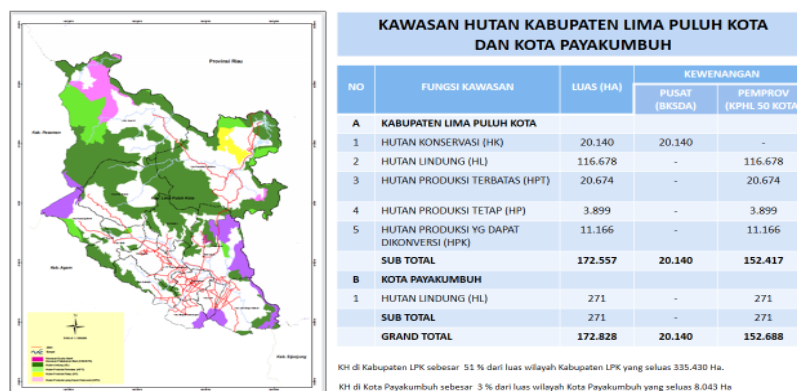
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada 0°25'28,71"LU-0°22'14,52"LS dan 100°15'44,10"BT-100°50'47,80"BT dengan luas ± 3.354,30 (tiga ribu tiga ratus lima puluh empat koma tiga) km², terdiri atas 13 kecamatan dan 79 nagari dan Jumlah Penduduk : 368.985 jiwa dengan batas-batas administrasi sebagai berikut: Sebelah utara: Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar (Provinsi Riau); Sebelah timur: Kabupaten Kampar (Provinsi Riau); Sebelah selatan: Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung; Sebelah barat: Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman; dan Bagian tengah berbatasan dengan Kota Payakumbuh.

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki beragam potensi baik potensi alam maupun potensi budaya, namun beragamnya potensi tersebut tidak banyak yang dimanfaatkan oleh masyarakat, banyak terjadi penebangan liar dan pembakaran hutan liar yang terjadi, sehingga banyak terjadi konflik di sekitar hutan di Nagari Taram.

Kondisi Hutan di Lima Puluh Kota

Berikut data kondisi hutan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota yang didapat dengan metode wawancara dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :



Gambar 3 Data Kondisi Hutan

Sesuai dengan hasil penelitian yang ditemukan terlihat bahwa luasan kawasan hutan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota seluas 51 % dari total luas secara keseluruhan. 11 dari 13 kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat kawasan hutan didalamnya. 64 dari 79 nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat kawasan hutan didalamnya. Hal ini masyarakat di 64 nagari tersebut terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kawasan hutan. Penggunaan kawasan hutan untuk dijadikan areal pertanian masyarakat masih terjadi dan cenderung bertambah dari waktu ke waktu dan cenderung bertambah sejalan dengan penambahan jumlah penduduk.

Kondisi Kebakaran Hutan di Nagari Taram

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara dan data dokumentasi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut ;



Gambar 4. Data Kebakaran Hutan

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Kehutan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat bahwa, banyak terjadi kebakaran hutan yang dilakukan secara disengaja oleh masyarakat dan para investor yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki luas hutan sebesar 172, 557 Hektar, luasnya hutan yang ada banyak masyarakat tidak mampu untuk mengelolah hutan tersebut sehingga banyak para investor melakukan perusakan hutan. Menurut data yang di temukan oleh Dinas Kehutanan di Kabupaten Lima Puluh Kota, kebakaran hutan ini bisa terjadi 5 kali dalam setahun, sehingga ,mengakibatkan dampak buruk terhadap masyarakat sekitar hutan.

Dampak Kebakaran Hutan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dilihat dampak buruk kebakaran hutan yang terjadi sebagai berikut :

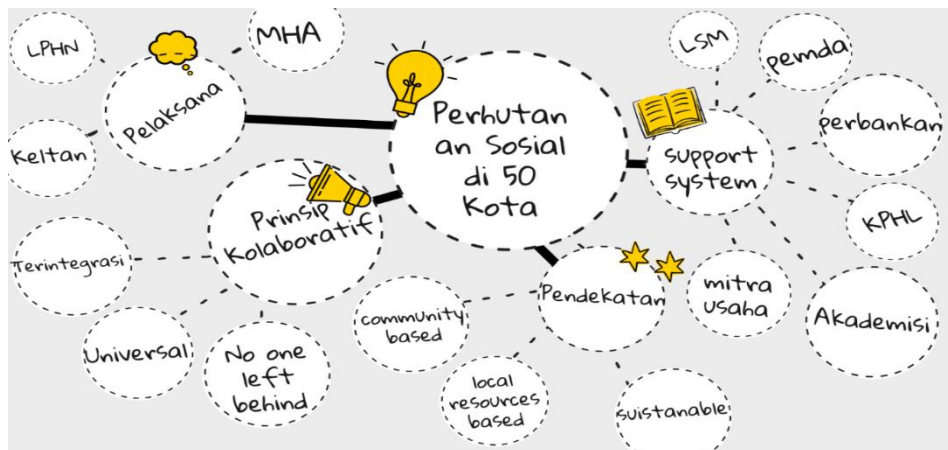


Gambar 5. Data Dampak Buruk Kebakaran Hutan

Sesuai dengan hasil penelitian yang ditemukan terlihat bahwa dengan banyaknya penebangan liar dan kebakaran hutan yang terjadi di Lima Puluh Kota mengakibatkan banjir dan tanah longsor, maraknya terjadi pembalakan liar, kebakaran hutan terjadi diakibatkan ulah manusia yang tidak bertanggung jawab dan pada saat musim hujan datang, akan terjadi banjir dimana-mana, karena pepohonan sudah banyak yang ditebang habis. Belum lagi pada saat masyarakat di sekitar hutan mengambil hasil hutan tanpa mengurus izinnya terlebih dahulu. Hal ini bisa mengakibatkan masyarakat tersebut berurusan dengan aparat hukum. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak punya pilihan lain karena himpitan ekonomi. Jika dibiarkan hal ini terus menerus maka akan terjadi kerusakan lingkungan yang semakin parah dan jika terjadi bencana maka kondisi sosial dan ekonomi masyarakat akan semakin terpuruk.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Banyaknya data kerusakan hutan yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga menimbulkan dampak buruk terhadap masyarakat sekitar secara ekonomi maka pemerintah membuat sebuah kebijakan perhutanan sosial dengan konsep sebagai berikut :



Gambar 6. Peta Fikiran (*Mind Mapping*) Kegiatan Penguatan Perhutanan Sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bahwa dengan luasnya hutan yang dimiliki maka pemerintah membuat sebuah program Perhutanan Sosial dengan konsep sesuai dengan data yang ditunjukkan pada gambar diatas. Hal ini dilakukan agar hutan di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat menjadi sumber penghasilan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar hutan, dengan terkelolanya hutan dengan baik sehingga tidak terjadi lagi kebakaran dan pembalakan hutan secara liar.

Bagaimana Strategi Komunikasi Penyelesaian Konflik Perusakan Hutan di Kabupaten Lima Puluh Kota

Pola komunikasi dalam penyelesaian konflik perusakan hutan yang dimaksudkan pada fokus penelitian ini, yaitu meliputi pendekatan dan strategi sebagai upaya penyelesaian maupun upaya preventif konflik vertical antara warga masyarakat kawasan dengan aparat Dinas Kehutanan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Pola ini merupakan bentuk yang terstruktur di dalamnya terdapat unsur holistik, melengkapi dan bekerja sama. Pola komunikasi ini ditujukan untuk membangun upaya kerjasama antar masyarakat tani maupun dengan pihak-pihak lain seperti LSM masyarakat dalam penyelesaian konflik.

Dalam menyelesaikan konflik perusakan hutan yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota penulis melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Kehutanan Lima Puluh Kota sebagai berikut ;

Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Kabupaten Lima Puluh Kota kondisi hutan yang ada di Lima Puluh Kota sangat luas, banyak fenomena yang terjadi penebangan hutan secara liar, pembakaran hutan dan pembukaan lahan untuk perkebunan sehingga banyak mengganggu aktivitas pertanian masyarakat, penyebab terjadinya pembakaran hutan disebabkan oleh masyarakat sekitar hutan, guna untuk memperluas lahan masyarakat tersebut, dampak yang ditimbulkan dari perusakan hutan banyak terjadinya bencana alam, selama 5 tahun belakangan terjadi banjir yang sangat parah di daerah taram, pangkalan dari pada sebelumnya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan bidang kehutanan secara umum yang diatur dengan Keputusan Menteri Kehutanan dapat dikemukakan, di antaranya: (1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 6884/KPTS-II/2002 tanggal 12 Juli 2012 tentang Kriteria dan Tata Cara Evaluasi terhadap Industri Priemer Hasil Hutan Kayu; (2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 6885/KPTS-II/2002 tanggal 12 Juli 2012 tentang Tata Cara Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan; (3) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 178/KPTS-II/2003 tanggal 12 Juli 2003 tentang Cara Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Unit Manajemen dalam Rangka Pengelolaan Hutan

Secara Lestari; (4) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.279/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri kehutanan Nomor: 126/KPTS-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan tanggal 2 Agustus 2004; (5) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: P. 26/ Menhut-II/2005 tanggal 16 Agustus 2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak; (6) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: P. 20/Menhut-II/2005 tanggal 25 Juli 2005 tentang Kerja Sama Operasi (KSO) pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman; (7) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: P. 03/ Menhut-II/2005 tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan atau pada Hutan Tanaman yang Diterbitkan Oleh Gubernur atau Bupati/ Walikota; dan (8) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: P. 18/ Menhut-II/2005 tanggal 13 Juli 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 126/ KPTS-II/2003 tentang Penataan Hasil Hutan (Supriadi, 2011).

Selanjutnya dengan strategi komunikasi vertikal yang dilakukan, penulis menemui Kepala KPHL Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melakukan wawancara terkait pengawasan terkait perusakan hutan di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut

Menurut kepala KPHL Kabupaten Lima Puluh Kota, fenomena kebaran hutan ini sudah sering terjadi, kebakaran hutan terjadi terkadang di malam hari dan disiang hari, pihak KPHL telah berusaha menyelidiki pelaku pembakaran hutan, kami berasumsi pembakaran ini dilakukan oleh para investor dan pebisnis besar ternyata pelaku pembakaran itu warga sekitar hutan, guna untuk melakukan perluasan lahan pertanian mereka agar ekonomi mereka meningkat.

Perambahan hutan, pencurian kayu, perbedaan penafsiran batas kepemilikan dan pengelolaan merupakan penyebab konflik kehutanan di Indonesia (Wulan dkk., 2004). Teori konflik yang dikemukakan oleh Dahrendorf (1986), dipahami melalui suatu pemahaman bahwa masyarakat memiliki dua wajah karena setiap masyarakat kapan saja tunduk pada perubahan, sehingga asumsinya bahwa perubahan sosial ada dimana-mana.

Menurut Shannon & Weaver dalam Cangara (2014), rintangan komunikasi adalah hambatan yang membuat proses komunikasi tidak dapat berlangsung sebagaimana harapan komunikator dan penerima. Ditambahkan pula menurut Robbins (2002), tidaklah mudah untuk menciptakan suatu komunikasi yang efektif tersebut, karena adanya hambatan-hambatan dalam berkomunikasi. Terdapat hambatan komunikasi yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan dalam penyelesaian konflik kawasan hutan. Komunikasi dilakukan melalui proses sosialisasi secara bersama dengan menyampaikan pesan yang diharapkan masyarakat dapat memahami tata kawasan hutan, pada lain hal proses komunikasi menimbulkan adanya sikap skeptis dan apatis masyarakat terhadap aturan tata kawasan hutan, diantara hal yang mempengaruhi sikap masyarakat tersebut adalah faktor eksternal yang tumbuh dan berkembang dari luar masyarakat.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap tokoh masyarakat di Nagari Taram sebagai berikut :

Menurut tokoh masyarakat di Nagari Taram, hutan di Lima Puluh Kota sangat luas, namun lahan yang bisa di kelolah oleh masyarakat sangat terbatas, sedangkan aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota mayoritas bertani, hal ini menjadi pemicu masyarakat sekitar hutan melakukan pembakaran hutan dan penebangan liar guna untuk memperluas lahan mereka tanpa memikirkan dampak negatif yang akan ditimbulkan.

Carl. I. Hovland dalam Purba dkk. (2006), mengatakan proses komunikasi adalah dimana seseorang (komunikator) menyampaikan perangsang-perangsang (biasanya lambanglambang dalam bentuk kata-kata) untuk merubah tingkah laku orang lain (komunikan). Komunikasi Antar Pribadi adalah komunikasi yang berlangsung antara dua individu atau lebih yang dapat berlangsung secara tatap muka (*face to face*). Strategi penyelesaian konflik yang dilakukan Pemda dibedakan dalam dua pendekatan penyelesaian, yaitu pendekatan formal kelompok dan pendekatan internal persuasif.

erbal, penggunaan kosa kata sederhana yang mudah dipahami.

Pola komunikasi diartikan sebagai bentuk atau pola hubungan dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami (Djamarah, 2004). Sedangkan menurut Sunarto (2006), dimensi pola komunikasi terdiri dari dua macam, yaitu pola yang berorientasi pada konsep dan pola yang berorientasi pada sosial yang mempunyai arah hubungan yang berlainan. Pola komunikasi yang terbangun dalam upaya penyelesaian konflik kawasan hutan antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota dan masyarakat kawasan di Kabupaten Lima Puluh Kota, antara lain: Pola komunikasi pendekatan kolektif (pemerintah dan tokoh masyarakat), Pola dengan pendekatan persuasif kekeluargaan, serta Pola komunikasi dengan pendekatan kesejahteraan (budaya dan penawaran program).

Bagaimana Peran Pemerintah dalam menjaga Pelestarian Hutan di Kabupaten Lima Puluh Kota

Komunikasi lingkungan sebagai suatu cara untuk mengatasi masalah komunikasi. Maka dari itu, komunikasi lingkungan adalah suatu usaha penyampaian pesan kelestarian lingkungan hidup dengan menggunakan pendekatan, prinsip, strategi dan teknik komunikasi untuk pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian pesan antara manusia satu dengan yang lainnya (Flor dan Cangara, 2018). Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan menggunakan wawancara bersama Kepala Dinas Kehutanan terkait dengan fenomena pembakaran hutan yang terjadi bagaimana langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melestarikan hutan untuk kedepannya, berikut keterangan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Lima Puluh Kota ;

Pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota menyadi bahwa aset yang dimiliki yaitu luasnya hutan yang bisa dikelola sebagai peningkatan ekonomi masyarakat, dengan luasnya hutan yang tidak terkelola merangsang masyarakat untuk melakukan perluasan lahan dan membakar dan pembalakan liar, banyak program yang sudah direncanakan untuk pelestarian hutan di Kabupaten Lima Puluh Kota salah satunya program perhutanan sosial dan budidaya gambir, Namun dengan keterbatasan anggaran pemerintah Kabupaten mengharapkan bantuan dari pemerintah Provinsi.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan salah satu hambatan komunikasi pemerintah Kabupaten dalam melakukan pelestarian hutan di Kabupaten Lima Puluh Kota adanya keterbatasan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi. Pesan yang terdapat pada komunikasi informatif untuk menyampaikan hal baru yang hanya cukup diketahui untuk diketahui saja. Teknik ini berdampak kognitif, biasanya teknik informatif yang digunakan oleh media bersifat asosiasi, yaitu dengan cara menumpangkan penyajian pesan kepada objek atau peristiwa dan pemberitahuan yang sedang menarik perhatian khalayak

Hasil wawancara dengan Dinas Kabupaten Lima Puluh Kota mendapatkan pesan agar penulis dapat melakukan komunikasi dengan pihak Pemerintah Provinsi, adapun keterangan dari Pemerintah Provinsi berdasarkan metode wawancara sebagai berikut :

Kabid Kehutanan Provinsi menyatakan bahwa hutan di Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki potensi yang besar untuk dijadikan objek wisata, kami dari pihak provinsi sangat mendukung program yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, dalam mendorong program tersebut kami sudah mulai untuk mencari pemodal besar untuk bisa ber investasi di lokasi hutan di Kabupaten Lima Puluh Kota, memang 5 tahun kebelakang hutan di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak terkelola dengan baik sehingga menyebabkan dampak negatif, untuk kedepan kami akan mendukung dan membuat banyak program untuk mengelola hutan termasuk program perhutanan sosial.

Teknik komunikasi kedua adalah komunikasi instruktif atau koersif. Instruktif adalah perintah yang bersifat mengancam tetapi ancamannya mengandung suatu perintah yang pasti dilaksanakan. Teknik ini biasanya dilakukan oleh pimpinan. Sedangkan koersif adalah suatu proses komunikasi menggunakan tekanan yang memiliki lawan komunikasi dalam keadaan lemah bisa dibilang menggunakan paksaan atau kekerasan.

Menurut Effendy dalam Afiati (2015), komunikasi instruktif merupakan suatu penyaluran desakan kepada komunikan pada suatu organisasi yang menerapkan aturan secara tegas. Jika dilanggar akan dikenakan sanksi oleh siapa yang melanggar. Teknik ketiga adalah komunikasi persuasif. Teknik ini merupakan penyaluran pesan dari komunikator kepada komunikan agar merubah opini, sikap, dan perilaku atas kesadaran diri. Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang pada dasarnya memiliki tujuan membujuk dan mempengaruhi komunikan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang sumber pesan (Effendy, 2015).

Bagaimana Pendapat Ekonomi Masyarakat terhadap Hutan di Lima Puluh Kota

Satrategi komunikasi yang dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan pola komunikasi pariwisata. Sebagaimana yang disampaikan oleh Maria Fitriah (2012) bahwa proses dalam menyampaikan pesan untuk melakukan penawaran terhadap produk jasa kepada calon konsumen dengan melalui cara yang bersifat persuasif maupun bujukan merupakan penjelasan dari komunikasi pariwisata. Dapat dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan dari beberapa definisi yang telah dikemukakan dari para ahli komunikasi pariwisata yaitu pesan yang disampaikan maupun informasi yang berkaitan pada perjalanan terhadap sebuah destinasi pariwisata yang akan dilakukan kunjungan oleh para wisatawan dengan menikmati objek wisata sehingga wisatawan mengetahui serta sangat tertarik untuk mengunjunginya.

Bukan hanya membahas mengenai komunikasi yang dilaksanakan antara pengelolaan wisata dengan pengunjung, melainkan komunikasi pariwisata dalam konteks yang lebih dalam merupakan komunikasi dari pihak terkait yang memberikan dorongan pada penciptaan platform big data dan juga dengan melalui pengimplementasian jaringan dengan melakukan pertukaran ide secara aktif. Dengan demikian secara serentak akan tercipta komunikasi dari pengelola wisata dengan para pengunjung, mitra, investor, serta pengambil kebijakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat terkait dengan bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat terhadap hutan di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan program perhutanan sosial sebagai berikut :

Menurut keterangan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat secara umum Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki hutan yang sangat bagus, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat ada program perhutanan sosial, Pemerintah Provinsi baru mengeluarkan izin dan SK hutan nagari kepada lembaga nagari perhutanan sosial baru di Nagari Taram, izin tersebut di kawasan hutan pinus, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat adalah wisata air dan pohon pinus sebagai eko wisata, masyarakat telah legal untuk mengelola hutan baik hutan primer maupun hutan pinus. Disitu masyarakat bisa menjaga kelestarian hutan dan memanfaatkan hutan sebagai pendapatan ekonomi, program Pemerintah kedepan akan mengeluarkan izin perhutanan sosial untuk lokasi hutan yang lain di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh dari keterangan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, program perhutanan sudah di jalankan di salah satu Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Nagari Taram, Program ini mampu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan hutan sebagai ekowisata, akses usaha dan pengembangan kelembagaan, yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga nagari, masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Dalam menjalankan strategi komunikasi pariwisata dengan Pemerintah Provinsi penulis mendapatkan pesan komunikasi yang terlibat dalam peningkatan ekonomi masyarakat dan menjaga pelestarian hutan di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan program perhutanan sosial perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat di Nagari Taram, pola komunikasi yang dilakukan kepada masyarakat dengan mengadakan FGD kepada masyarakat di Nagari Taram, pesan yang disampaikan di dalam forum grup diskusi dengan

bahasa yang sederhana dan meminta masyarakat untuk bisa menjaga pelestarian hutan agar program perhutanan sosial yang dilakukan bisa bertahan lama.

Focus Group Discussion (FGD) adalah bentuk diskusi yang didesain untuk memunculkan informasi mengenai keinginan, kebutuhan, sudut pandang, kepercayaan dan pengalaman yang dikehendaki peserta. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa FGD adalah salah satu teknik pengumpulan data kualitatif yang didesain untuk memperoleh informasi keinginan, kebutuhan, sudut pandang, kepercayaan dan pengalaman peserta tentang suatu topik, dengan pengarahan dari seorang fasilitator atau moderator. Tujuan FGD adalah untuk mengeksplorasi masalah yang spesifik, yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Teknik ini digunakan dengan tujuan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari peneliti terhadap masalah yang diteliti. FGD digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap makna-makna intersubjektif yang sulit diberi makna sendiri oleh peneliti karena dihalangi oleh dorongan subjektivitas peneliti

SIMPULAN

Permasalahan sosial, ekonomi, dan kebijakan tentunya juga akan mempengaruhi pengelolaan hutan secara berkelanjutan khususnya dalam pengembangan ekowisata. Dalam pengelolaan perhutanan sosial bukan saja masyarakat yang terlibat, namun berbagai bentuk partisipan juga ikut campur dalam pengelolaan hutan seperti pemerintah, LSM, koperasi, perbankan, perguruan tinggi dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra dalam pembangunan kehutanan.

Untuk mengatasi permasalahan perusakan hutan yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan berbagai macam strategi komunikasi yaitu preventif konflik vertical antara warga masyarakat kawasan dengan aparat Dinas Kehutanan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Pola ini merupakan bentuk yang terstruktur di dalamnya terdapat unsur holistik, melengkapi dan bekerja sama. Strategi penyelesaian konflik yang dilakukan Pemda dibedakan dalam dua pendekatan penyelesaian, yaitu pendekatan formal kelompok dan pendekatan internal persuasif.

Komunikasi lingkungan sebagai suatu cara untuk mengatasi masalah komunikasi. Maka dari itu, komunikasi lingkungan adalah suatu usaha penyampaian pesan kelestarian lingkungan hidup dengan menggunakan pendekatan, prinsip, strategi dan teknik komunikasi untuk pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Komunikasi pariwisata yaitu pesan yang disampaikan maupun informasi yang berkaitan pada perjalanan terhadap sebuah destinasi pariwisata yang akan dilakukan kunjungan oleh para wisatawan dengan menikmati objek wisata sehingga wisatawan mengetahui serta sangat tertarik untuk mengunjunginya.

Strategi komunikasi preventif konflik vertical, komunikasi internal, persuasif, lingkungan dan komunikasi pariwisata dapat menyelesaikan permasalahan konflik dalam perusakan hutan, dampak dari strategi tersebut menghasilkan solusi yang abik untuk peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan dengan menjalankan program perhutanan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Pers
- Cangara, Hafied. 2006. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Cox, R. (2010). *Environmental Communication And The Public Sphere*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Effendy, Onong Uchjana. 2007. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, Bandung* : PT Remaja Rosdakarya.
- Effendy, Onong Uchjana. 2004. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Rosdakarya
- Effendi, Onong Uchjana. 1992. *Dinamika Komunikasi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta, 1986.
- Fajar, Marhaeni. 2009. *Ilmu Komunikasi Teori & Praktik*. Yogyakarta : Graha Ilmu

- Hadiwijoyo, Surya Sakti. (2012). *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Kenmada. 2013. *Perencanaan Komunikasi Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Ultimus.
- Liliweri, Alo. 2001. *Gatra-Gatra Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Marx, Karl and Frederick Engels, 1948/1991. *The Communist Manifesto*. International Publisher, New York, USA.
- Mulyana Deddy. 2005. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Oepen, Manfred and Hamacher, Winfried. 1999. *Environmental Communication for Sustainable Development*
- Rogers Carl .R. 1961. *On Becoming A Person: A Therapist,s View of Psychoteraphy*. USA: Houghton Mifflin Company
- Suhandang, Kustadi. 2012. *Studi dan Penerapan Public Relations*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Undang Undang Republik Indonesia no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Widjaja, A.W. 2000. *Ilmu Komunikasi Pengantar Studi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Yenrizal, (2015). Makna Simbolik Sawah di Masyarakat Pedesaan Tinjauan Komunikasi Lingkungan pada Masyarakat Semende, Semende Darat Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Studi Dakwah dan Komunikasi*, no3